

MANAJEMEN PENDIDIKAN KEAGAMAAN DALAM MEMBENTUK TOLERANSI ANTAR AGAMA BAGI PENDIDIKAN PERWIRA POLRI

Wahdan Sanur Tarihoran

*Program Doktor UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten
Jl. Jend. Sudirman No. 30 Ciceri Serang Banten Indonesia 421118
e-mail: wahdantarihoran@gmail.com*



Abstract

Sekolah Pembentukan Perwira (Setukpa) merupakan Lembaga Pendidikan yang bertugas membentuk Bintara Polri terpilih dari seluruh Indonesia dengan latar belakang pendidikan, penugasan, status dan agama yang berbeda untuk menjadi seorang Perwira Pertama Polri (Pama Polri) yang akan ditempatkan pada lini terdepan diseluruh Indonesia. Kehadiran Pama Polri berfungsi sebagai pemimpin garis terdepan Polri sekaligus sebagai jembatan antara bawahan dan atasan serta sebaliknya. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui bagaimana manajemen pendidikan keagamaan bagi pendidikan Pama Polri mencakup aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan dalam membentuk sikap toleransi antar umat beragama di Setukpa Polri. Metode yang digunakan adalah Deskriptif Kualitatif untuk mendeskripsikan proses manajemen pendidikan keagamaan. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan keagamaan yang dilakukan mengadopsi materi berkaitan dengan pembentukan sikap dan tata nilai yang diaplikasikan dalam praktik pelaksanaan beribadah serta kerjasama yang diwujudkan dalam manajemen pengorganisasian kesiswaan melalui pola pengasuhan yang terstruktur dan terukur. Penelitian ini diharapkan memberikan implikasi pada penerapan Islam yang moderat bagi pendidikan Pama Polri sebagai dalam pelayanan, perlindungan dan pengayoman serta penegakan hukum, ditengah-tengah masyarakat.

Keywords: Pendidikan keagamaan, perwira pertama polri, sekolah pembentukan perwira, toleransi beragama.

PENDAHULUAN

Toleransi antar bagi bangsa Indonesia yang memiliki suku, agama dan budaya yang sangat beragam menjadi suatu keniscayaan sebagai sekaligus sebagai suatu bentuk dari moderasi dalam beragama yang akan mewujudkan kerukunan dalam rangka mencapai pembangunan nasional.

Pendidikan keagamaan dipandang memiliki peran penting dalam menanamkan nilai kebenaran terhadap agama yang diyakini sekaligus sarana membentuk sikap toleransi bagi peserta didik. Toleransi antar umat beragama dapat ditanamkan melalui lembaga pendidikan yang mengajarkan dan mengaplikasikan nilai-nilai agama dalam kehidupan interaksi peserta didik terutama bagi seorang Perwira Polri yang akan memimpin dan bertugas diseluruh wilayah Indonesia. Penelitian Nurbaeti dkk, menyimpulkan bahwa Pendidikan agama yang diajarkan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap karakter beragama (Nurbaeti, Khalik, dan Nisa 2018). Pendidikan sebagai suatu proses transfer pengetahuan dan pengalaman terjadi dalam bentuk interaksi antar individu yang berperan dalam menumbuhkan kepribadian peserta didik (Pidarta 1997). Kepribadian yang secara utuh terwujud dalam bentuk penghargaan terhadap adanya perbedaan yang dikenal dengan toleransi.

Upaya untuk mewujudkan sikap toleransi dalam dunia pendidikan adalah melalui kerukunan (Fuad 2018) sebab dalam lingkungan pendidikan, siswa akan berinteraksi, belajar menghormati perbedaan atau penerimaan terhadap orang lain terhadap lingkungan yang belum tentu ditemukan dalam lingkungan tempat tinggalnya (Endang 2011),

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana Setukpa polri menanamkan nilai toleransi antar umat beragama bagi calon-calon Pama Polri melalui manajemen pendidikan keagamaan dengan menggambarkan kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan Setukpa Lemdiklat Polri serta untuk mengetahui faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pendidikan keagamaan dalam membentuk toleransi antar agama di lingkungan Setukpa Polri.

KAJIAN TEORI

Kegiatan manajemen pendidikan keagamaan yang dilaksanakan di Setukpa sudah sejalan dengan prinsip-prinsip manajemen yaitu rangkaian kegiatan yang diawali dengan *planning* (Perencanaan), *organizing* (pengorganisasian), *actuating* (Pelaksanaan), *Controlling* (Pengendalian), ada yang menambahkan kegiatan *Motivating* (Siagian 1989), definisi manajemen sebagai suatu kegiatan untuk mengatur, mengelola, melaksanakan dan memperlakukan (Echolas 1995), suatu proses mengkoordinir pekerjaan untuk mencapai tujuan agar efektif dan efisien melalui kegiatan orang lain dengan menggunakan alat berupa *man, money, materials, machines, method* dan *markets* (Coulter 2007) dan (Siagian 1989). Hal ini juga sejalan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Undang-undang RI No. 20 tahun

2013 disebutkan bahwa Pendidikan Nasional yang dilaksanakan harus berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman, sedangkan yang dimaksud dengan pendidikan kedinasan berfungsi meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam pelaksanaan tugas kedinasan bagi pegawai dan calon pegawai negeri suatu departemen atau lembaga pemerintah non-departemen (pasal 29).

Prinsip manajemen pendidikan Islam secara umum digambarkan dalam bentuk materi dengan adanya kandungan keikhlasan, jujur, amanah, adil, tanggung jawab, dinamis, praktis dan fleksibel (Ramayulis 2008) serta Iman dan akhlak, keadilan dan persamaan, musyawarah, pembagian kerja dan tugas, berpegang pada fungsi manajemen, pergaulan dan keikhlasan (Langgulang 2000),

Selanjutnya unsur manajemen dalam pendidikan Islam menurut Saefullah adalah Pimpinan, orang-orang yang dipimpin, tujuan yang akan dicapai, kerjasama dalam mencapai tujuan tersebut, sarana atau peralatan manajemen yang terdiri dari Manusia, Uang, bahan-bahan, mesin, metode dan pasar (Saefullah 2012)

Kehadiran lembaga-lembaga pendidikan yang mampu membangun interaksi positif antar peserta didik dengan tenaga kependidikan maupun sesama peserta didik akan memberikan dampak dalam perkembangan kehidupan peserta didik setelah menyelesaikan tugas pendidikannya. Selain hal itu, lembaga pendidikan juga harus mampu menimbulkan kesadaran dan rasa tanggung jawab kepada peserta didik akan kehadirannya sebagai manusia seutuhnya dari segi biologis dan psikologis (I. T. Barizi 2004) .

Masyarakat Indonesia secara sadar mengakui adanya pluralitas budaya serta perbedaan yang timbul akibat adanya kemajemukan social, budaya, agama namun berbagai kalangan masih sering menganggap pendidikan agama Islam gagal dalam membangun toleransi serta kesadaran dalam membangun perbedaan budaya (Suyatno 2013), sehigga dalam proses pendidikan perlu ditanamkan bukan saja pemahaman peserta didik terhadap agamanya sendiri, melainkan dituntut agar mampu mengakui keberadaan agama lain, serta berusaha untuk terlibat dalam memahami perbedaan yang ada. (Shihab 1999)

Kata toleransi sendiri berasal dari bahasa Latin *tolerantia* dengan makna kelonggaran, kelembutan hati, keringanan juga kesabaran yang pada masa Revolusi Perancis dikaitkan dengan slogan kebebasan, persamaan dan persaudaraan (Dinata 2012) dalam bahasa Belanda digunakan dengan kata *tolerere* yang berarti membolehkan, membiarkan, didalamnya terdapat makna tidak perlu terjadi dengan menghormati prinsip orang lain dengan tidak

mengorbankan prinsip sendiri (Munawwar 2005) sedangkan dalam bahasa Inggris '*tolerance*' yang mengandung makna sikap membiarkan, menghormati keyakinan orang lain tanpa memerlukan persetujuan, dalam bahasa Arab, kata ini diadopsi dari makna '*tasamuh*' dengan arti kata saling mengizinkan atau saling memudahkan (Dinata 2012)

Toleransi tidak memandang semua agama sama lantas melakukan pindah-pindah agama, harus ada batas-batas yang tidak boleh dilanggar, Pemahaman agama yang lebih luas akan membawa individu pada pandangan yang terbuka terhadap agama lain karena individu tersebut akan meletakkan agama tidak saja sebagai *way of life* dan *weltanschauung*, namun harus berfungsi sebagai *agent of mental and spiritual power* dalam revivalisme dan rekonstruksiolisme masyarakat. Agama tidak saja tercermin dalam doktrin agama, tetapi juga dalam sikap dan pendirian manusia yang tidak dapat berdiri sendiri. (Arifin 1991). Indeks Kerukunan Umat beragama terbitan Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan Departemen Agama tahun 2019 menunjukkan bahwa Toleransi menjadi salah satu indikator yang dapat menciptakan kerukunan hidup umat beragama (Kementerian Agama 2019) .

Sikap toleransi dalam dunia pendidikan diharapkan akan memunculkan nilai-nilai yang berwawasan pada terciptanya kerukunan, indikator yang dapat terlihat dalam praktek pengamalan nilai:

- a. *Religiusitas*; terpancarnya nilai-nilai keagamaan
- b. Moralitas terpuji; munculnya nilai-nilai keagamaan dan social
- c. Keharmonisan; adanya hubungan yang serasi senada, tenggang rasa saling mengasihi, saling menyayangi dan peduli
- d. Kedinamisan, tertanamnya nilai dan suasana yang interaktif bergerak, bersemangat arif dan bijak.
- e. Kreativitas, mengembangkan gagasan, upaya dan kreativitas bersama dalam membangun
- f. Produktivitas, membentuk nilai-nilai social dalam mengentaskan kemiskinan, kebajikan dan bakti social (Barizi 2005).

Dalam pendidikan Islam, konsep kerukunan tersebut diarahkan untuk mengembangkan wawasan untuk:

- a. Menumbuhkan sikap saling menghormati dan menanamkan rasa simpati yang akan memicu munculnya persaingan yang positif
- b. Saling menghargai antar pemeluk agama yang berbeda
- c. Menerima orang lain
- d. Berfikir optimis dengan mengembangkan nilai terbaik sangka (Tauleka 2011)

Abdul fatah dalam penelitiannya di SMA Negeri 1 Tangerang menyimpulkan bahwa untuk menanamkan nilai-nilai toleransi bagi peserta didik dapat dilakukan dengan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa (*student centered*) (Fatah 2012), hal yang hampir sama ditemukan Mochammad Arie Maulana yang melakukan penelitian di Geeta School Cirebon dengan tambahan konsep pembelajaran aktif (*active learning*) (Maulana 2017). A. Jauhar Fuad dalam penelitiannya tentang Pembelajaran Toleransi Upaya, Upaya guru Pendidikan Agama Islam dalam menangkal paham Radikal di Sekolah menyebutkan bahwa Toleransi dapat dilakukan dengan menggunakan teori Konstruktivistik dan sikap toleransi ini akan menghindarkan siswa untuk mengklaim kebenaran agamanya dengan menafikan kebenaran agama yang lain. (Fuad 2018)

Subhan Fadli menyebutkan bahwa sikap toleransi didasari adanya kebebasan beragama dan akan tumbuh berkembang secara psikis, fikiran dan fisiknya, dan nilai yang diyakini dihormati serta diagungkan masyarakat bangsanya niscaya akan berperan positif bagi hidup berbangsa dan bermasyarakat (Fadli 2019). Ni Nyoman Ayu menyebutkan bahwa pendekatan multicultural yang diterapkan guru dalam pembelajaran terhadap siswa yang berbeda secara kultural akan mendorong siswa untuk mengalami perasaan yang positif dan sebaliknya, sehingga mampu mengembangkan konsep diri dan mau menerima orang lain. (Ayu Suciartini 2017), sedangkan U. Abdullah Mumin dalam penelitiannya tentang Pendidikan Toleransi Perspektif Pendidikan Agama Islam menyimpulkan bahwa kurikulum, kompetensi guru, pendekatan serta metode belajar inklusif merupakan hal yang penting dalam pendidikan toleransi (Mumin 2018).

Lely Nisvilyah dalam penelitiannya menemukan nilai kemanusiaan, nasionalisme, historis, keteladanan dan kesabaran menjadi dasar terbentuknya toleransi di kabupaten Mojokerto (Nisvilyah 2013), Yuna Maya Sari menemukan bahwa dengan penanaman nilai kewarganegaraan (*civic disposition*), nilai-nilai toleransi dapat tertanam pada siswa secara pribadi maupun universal (Sari 2014).

Muhammad Usman dan Anton Widyanto menemukan bahwa tenaga pengajar yang kompeten, fasilitas dan dukungan kepala sekolah menjadi faktor pendukung Internalisasi Nilai-nilai toleransi dalam Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 1 Lhokseumawe dan tidak adanya modul khusus dan pelatihan khusus menjadi faktor kelemahan (Usman dan Widyanto 2019), faktor ini juga ditemukan oleh Andi Fitirani D dan Anwar Akbar dengan perbedaan pada terbatasnya jam pelajaran menjadi faktor penghambat (Djollong dan Akbar

2019). sementara Achmad Nur Salim menemukan unsur budaya menjadi faktor pendukung penanaman nilai toleransi di Sleman dan cara pandang individu yang tidak diimbangi dengan nilai sosial menjadi faktor penghambat (Salim 2017) hal yang hampir sama dalam faktor pendukung yang ditemukan Babay Barmawie dan Fadhila Humaira dengan menyebutkan faktor ketertutupan komunikasi sebagai faktor penghambat (Barmawie dan Humaira 2018)

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah *Deskriptif Kualitatif* untuk mendeskripsikan proses manajemen pendidikan keagamaan. Pengumpulan data dilakukan di Setukpa Polri Sukabumi Jawa Barat dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan mengamati setiap pelaksanaan kegiatan keagamaan yang dilakukan ditempat ibadah serta lokasi lain yang diperuntukkan peribadatan keagamaan seperti auditorium atau kelas yang melibatkan peserta didik. Wawancara dilakukan secara tidak terstruktur, informan terdiri atas tenaga pengasuh, Pembina Rohani, dan peserta didik pada saat pelaksanaan kegiatan keagamaan sedangkan dokumentasi diperoleh buku, keputusan serta jurnal penelitian yang relevan dengan tema yang dibahas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Lokasi Penelitian

Sekolah Pembentukan Perwira (selanjutnya disebut Setukpa) berlokasi di Jalan Bhayangkara No. 166 Sukabumi Jawa Barat yang berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No 52 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki tugas utama untuk mendidik Bintara Polri terpilih menjadi Perwira Polri. Ditegaskan kembali dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 21 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja lingkungan Mabes Polri menjelaskan bahwa tugas tersebut dilaksanakan dalam bentuk Pendidikan dan Pelatihan dengan filosofi mahir, terpuji, patuh hukum dan unggul yang Profesional, modern dan terpercaya (Promoter).

Perwira Polri yang dibentuk di Setukpa Polri diharapkan memiliki kemampuan sebagai Penyelia Pertama (*Fisrt line supervisor*) sekaligus sebagai manajer tingkat pertama dan jembatan antara atasan kepada bawahan serta sebaliknya. Tugas dan tanggung jawab tersebut mencakup kemampuan dalam fungsi teknis kepolisian maupun fungsi pembinaan serta sekaligus pemimpin

bagi anak buah yang harus mampu menerjemahkan kebijakan atasan menjadi perintah-perintah yang aplikatif dilapangan.

Untuk mencapai tujuan tersebut dirumuskan kurikulum yang diharapkan dapat menciptakan kemampuan-kemampuan baik secara kognitif, afektif maupun psikomotorik. Kemampuan tersebut diuraikan dalam bentuk Rangka Pelajaran Pokok, Rangka Pelajaran Terurai dan seterusnya hingga menjadi terwujud dalam proses yang dilaksanakan didalam kelas maupun diluar kelas.

Dalam operasional pendidikan dan pelatihan, pembentukan Perwira Polri dilaksanakan dalam bentuk reguler dan non reguler, pendidikan reguler dilaksanakan selama 7 bulan disebut dengan pendidikan Sekolah Inspektur Polisi dan non reguler selama 1 bulan disebut Pendidikan Alih Golongan. Kedua jenis pendidikan tersebut memiliki karakter dan tipologi yang sama dengan perbedaan mendasar berada pada rentang usia dan pangkat peserta didik serta lama pendidikan.

Pendidikan Pembentukan Perwira Polri untuk tahun 2019 diikuti oleh 1.500 orang peserta didik yang bersumber dari Bintara terpilih dari seluruh Indonesia dengan data sebagai berikut (Setukpa 2019):

Tabel 1
Peserta didik Berdasarkan Agama

NO	AGAMA	JUMLAH	Persentase
1.	Islam	1.172	78,13%
2.	Katholik	64	4,27%
3.	Protestan	204	13,60%
4.	Hindu	58	3,87%
5.	Budha	1	0,07%
6.	Konghuchu	1	0,07%

Tabel 2
Berdasarkan Pangkat

NO	PANGKAT	JUMLAH	Persentase
1.	AIPTU	85	5,67%
2.	AIPDA	309	20,60%
3.	BRIPKA	861	57,40%
4.	BRIGADIR	245	16,33%

Selain perbedaan agama dan pangkat, peserta didik yang melakukan pendidikan juga bersumber dari seluruh Polda di Indonesia ditambah satker Mabes Polri yang terdiri atas beragam suku, agama, ras dan budaya serta latar belakang pendidikan dan status perkawinan

Manajemen Pendidikan Keagamaan di Setukpa Polri

Peneliti menemukan data dari dokumen Rencana Operasional Pendidikan Sekolah Inspektur Polisi tahun 2019 diketahui beberapa komponen pendidikan yang ada di Setukpa sebagai berikut:

1. Kompetensi Lulusan

Profil lulusan pendidikan yang diharapkan setelah menyelesaikan pendidikan adalah sebagai Inspektur Polisi Dua dengan kualifikasi:

- a) Supervisor dalam melaksanakan tugas pokok kepolisian yang profesional dan berintegritas
- b) *First line supervisor* yang mampu mengelola sumber daya
- c) Analis masalah-masalah Harkamtibmas dan penegakan hukum sesuai dengan lingkup tugasnya

2. Kurikulum

Pendidikan yang dilaksanakan berdasarkan kurikulum yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri dengan 33 Mata Pelajaran yang terdiri atas kelompok kegiatan pengantar, kegiatan pembelajaran inti serta kegiatan evaluasi dan penutup

Kelompok kegiatan pembelajaran inti dibagi dalam beberapa kelompok pembelajaran yakni kelompok kepribadian, kelompok manajemen dan dukungan teknis, kelompok pengetahuan social, kelompok metode dan penulisan karya tulis, kelompok kuliah dan praktek kerja, kelompok kegiatan pengasuhan dan kegiatan ekstra kurikuler.

Ditemukan juga kurikulum bidang sikap dan tata nilai dalam bentuk Mata Pelajaran Ideologi Pancasila, Kode Etik Profesi, Etika Perilaku Perwira, Revolusi Mental, sementara dalam kelompok pengetahuan social ditemukan mata pelajaran Antropologi dan Hak Asasi Manusia yang menanamkan pengetahuan tentang konflik serta pemecahannya dengan berlandaskan hukum yang berlaku, sementara dalam kelompok pengasuhan ditemukan kegiatan yang menanamkan nilai-nilai Beriman dan Bertakwa dalam Implementasi Karakter Kebhayangkaraan serta kegiatan Implementasi Pembinaan Rohani.

Berdasarkan pengamatan dari materi yang tercantum dalam jadwal penceramah di Masjid al Muttaqin peneliti menemukan adanya berupa materi pentingnya *ukhuwah wathaniyah*, Prinsip kesetaraan, syukur nikmat, sedekah dan pengamalan ritual ibadah (teknis pelaksanaan ibadah).

Peneliti juga menemukan ketika kegiatan dilakukan sesuai dengan agama masing-masing, tema disesuaikan dengan perkembangan lingkungan disamping kegiatan ibadah ritual yang sudah ditentukan dengan tidak

menganut faham atau aliran tertentu saja. Hasil observasi peneliti dalam pelaksanaan sholat shubuh tim Pembina rohani Islam menyampaikan pemahaman bahwa, ketika Imam qunut, maka jamaah ikut melaksanakan qunut dan sebaliknya ketika Imam tidak qunut, maka jamaah yang lain tidak boleh qunut sendirian atau tidak mengikuti jamaah.

3. Proses Pembelajaran

Pendidikan dilaksanakan dalam 3 tahapan pendidikan yang terdiri dari tahapan dasar pembentukan perwira yang merupakan tahapan penyesuaian dan perubahan perilaku Bintara Polri menjadi Perwira Polri dilanjutkan dengan tahapan pemantapan dan pengembangan pengetahuan, keterampilan manajerial, manajemen pembinaan dan manajemen Operasional, tahap terakhir merupakan tahap penerapan kemampuan ilmu pengetahuan dan keterampilan secara utuh dalam bentuk latihan teknis.

Proses belajar dilaksanakan dalam bentuk pelajaran kelas dan lapangan, setiap kelas rombongan terdiri atas 15-20 orang peserta didik dengan jenis kelamin dan latar belakang yang berbeda, baik dari segi asal pengiriman, masa dinas, agama, suku, budaya dan sebagainya.

Ditemukan juga bahwa pelaksanaan ritual keagamaan diberikan waktu yang cukup, dari jadwal pelajaran yang diedarkan, peneliti melihat selalu terdapat jadwal waktu sholat serta himbauan kepada petugas kelas untuk mengingatkan tenaga pendidik 5 menit sebelum waktu sholat tiba. Disamping pelaksanaan sholat 5 waktu diberikan juga kesempatan kepada peserta didik untuk ikut menyampaikan materi keagamaan didepan peserta didik lainnya sebelum pelaksanaan sholat shubuh. Kegiatan keagamaan rutin selalu dilaksanakan secara bersamaan dengan agama lain, meskipun selain agama Islam tidak ada kewajiban untuk melaksanakan ritual 5 kali dalam sehari semalam,

Konsep pelaksanaan ritual keagamaan wajib dilaksanakan peserta didik ditempat ibadah masing-masing, kecuali pada waktu Maghrib dan Isya yang boleh dilaksanakan di barak yang merupakan tempat tinggal peserta didik. Khusus malam jum'at seluruh peserta didik diwajibkan untuk melaksanakan kegiatan beribadah sesuai dengan agama masing-masing dan wajib ditempat ibadah masing-masing dengan bimbingan dan pengawasan tenaga rohaniwan yang sudah dijadwalkan.

Selain sesuai agama masing-masing serta ditempat ibadah masing-masing juga dilakukan kegiatan bhakti social yang melibatkan seluruh unsur agama. Ditemukan juga pada pelaksanaan kegiatan hari besar keagamaan peserta didik yang berbeda agama memberikan partisipasi aktif berupa kegiatan

pengamanan, memberikan kesempatan yang luas untuk beribadah serta tidak membatasi pelaksanaan ritual keagamaan sesuai ketentuan yang berlaku.

4. Penilaian

Penilaian dilakukan dengan mempedoman Peraturan Kalemndlat Polri nomor 2 tahun 2017 tentang standar penilaian pendidikan Polri dan Peraturan Kalemndiklat Polri nomor 6 tahun 2009 tentang Penilaian Mental. Penilaian dilakukan terhadap aspek akademik dengan bobot 4, aspek mental kepribadian dengan bobot 4 serta aspek kesehatan dan kesamaptaan jasmani dengan bobot 2.

5. Tenaga Pendidik dan tenaga kependidikan

Setukpa Polri dipimpin oleh Kasetukpa dengan pangkat Brigadir Jenderal Polisi didukung dengan tenaga pendidik fungsional yang terdiri atas anggota Polri berpangkat AKP sampai AKBP atau PNS golongan III/C keatas. menurut Jenjang pendidikan akademis yang dimiliki terdapat 193 orang berlatar belakang S1, 64 orang S2 dan 2 Orang S3, dari sudut agama yang dianut terdapat Tim Pembina rohani masing-masing agama, untuk berdasarkan wawancara dengan team Pembina rohani agama Islam diketahui latar belakang Pembina Rohani adalah Syariah, aqidah filsafat, tarbiyah dan da'wah. Hal ini sesuai dengan surat Perintah Kasetukpa nomor : Sprin/85/II/DIK.2.1/2019 tentang penunjukan sebagai Pembina rohani keagamaan bagi peserta didik SIP tahun 2019.

Tabel 3
Daftar Nama Pembina Rohani

No	Nama	Pangkat	Ket
1	Drs. H. Ibrahim	AKBP	Ka Team Islam
2.	Seminar Sebayang, S.IK	AKBP	Anggota
3.	Teddy Raharja, SH, M.M	AKBP	Anggota
4.	Ahmad RN, S.Ag, M.M	Kompol	Anggota
5.	Amiruddin, S.Ag, M.M	Kompol	Anggota
6.	Drs. Waris, M.Pd.I	Pembina	Anggota
7.	Wahdan S.S.Sos.I	Penata I	Anggota
8.	B. Nanik SK	AKBP	Ka Team Katholik
9	Drg, Dedeh	AKBP	Anggota
10	Drs. J. Ebnu	AKBP	Anggota
11.	Agus S, S.Pd	Kompol	Anggota
12.	Tafilus R, S.E	AKBP	Ka Team Protestan
13.	Sebastian Saragih, S.Ik	AKP	Anggota
14.	Ferby Marcus, S.Sos	Iptu	Anggota
15.	Friana R.L, S.E	Iptu	Anggota

16.	Eko Kristiyanto, S.H	Ipda	Anggota
17.	I. Ketut Pengadilan, S.H	AKBP	Ka Team Hindu
18.	Drs. I Ketut Margayasa, S.H	Kompol	Anggota
19.	Johan Effemdi, S.Sos	AKP	Anggota
20	I Komang Y, S.H	AKP	Anggota
21	I Made Widiyana, S.E	AKP	Anggota

Untuk agama Katholik, Protestan dan Hindu ketika peneliti menanyakan dengan team Pembina rohani dan dikonfirmasi dengan Riwayat Hidup petugas yang diperoleh dari data Sistem Informasi Personel Polri tidak ditemukan Pembina Rohani yang memiliki latar belakang akademis dalam bidang agama Katholik, Protestan dan Hindu.

Hal ini dikuat oleh Subbag SDM yang menyatakan bahwa untuk selain agama Islam, tenaga Pembina rohani adalah personel yang dianggap mampu, bahkan untuk agama Budha dan Konghucu tidak ada personel maupun Pembina rohani yang bersumber dari personel Setukpa, sehingga untuk mengatasi hal tersebut dilakukan kerja sama dengan organisasi induk agama tersebut secara kedinasan dengan mencantumkan nama dan petugas dimaksud dalam surat tugas yang diberikan.

6. Sarana Prasarana

Seluruh peserta didik di tempatkan di Barak sesuai dengan penempatan peleton, subden dan batalyon masing-masing, Sebagai sarana peribadatan tersedianya fasilitas ibadah seperti :

- 1) Tempat Ibadah bagi Umat Muslim : Masjid Raya al Muttaqin, Mushalla al Abidin, Mushalla Nurul Muttaqin dan Mushalla Baitul Muttaqin
- 2) Tempat Ibadah bagi umat Katholik, Kapel Sugiyono S
- 3) Tempat Ibadah bagi umat Protestan: Gereja Syaloom
- 4) Tempat Ibadah bagi Umat Hindu: Pura Giri Wiradharma

Selain tempat ibadah yang khusus, juga dipersiapkan tempat ibadah di barak tempat tinggal peserta didik yang memungkinkan praktek ibadah dilakukan secara kelompok-kelompok kecil

Hasil pengamatan juga ditemukan pada saat peserta didik yang beragama Islam melaksanakan ibadah sholat ashar berjamaah di Masjid, peserta didik yang beragama Nasrani (Khatolik dan Protestan) melaksanakan ibadah di tempat Hall Musik berlokasi tidak jauh dari tempat sarana Masjid, ketika dilakukan wawancara dengan tim Pembina Rohani Nasrani perihal pemilihan tempat ibadah bukan di gereja yang tersedia, ditemukan jawaban "lokasi ini

berdekatan dengan Masjid, sehingga mobilitas pergerakan kebersamaan peserta didik dapat dipantau secara bersamaan”.

7. Pengelolaan Proses Belajar Mengajar

Secara umum proses pendidikan dilaksanakan di dalam kelas dengan total 1.400 Jam Pelajaran @ 45 menit, selama 210 hari (31 minggu/7 Bulan), kegiatan pendidikan keagamaan dilaksanakan ditempat ibadah serta mengaplikasikannya dalam praktek kehidupan interaksi sesama peserta didik, tenaga pendidik dan kependidikan lainnya yang dicatatkan dalam penilaian mental pribadi peserta didik serta melakukan penilaian sosiometri sesama peserta didik

Berdasarkan observasi ditempat ibadah Gereja dan Pura pelaksanaan kegiatan implementasi pembinaan rohani keagamaan ditemukan tenaga pendidik dan pengampu materi keagamaan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi masing-masing baik yang bersumber dari internal lembaga maupun melibatkan tenaga pengajar atau narasumber dari luar yang berkompeten seperti dari PDGI, PHDI dan juga ke Uskupan Sukabumi.

Ditemukan juga keterlibatan peserta didik dalam pelaksanaan kegiatan keagamaan yang tertuang dalam struktur organisasi perangkat siswa, berupa adanya kepala bidang keagamaan dengan subbid masing-masing agama. Salah seorang perangkat ketika ditanya alasan pemilihan perangkat organisasi peserta didik dijawab dengan alasan mempertimbangkan keseimbangan antar agama, tanpa ada paksaan serta kesepakatan antar peserta didik.

8. Pembiayaan

Pembiayaan pelaksanaan pendidikan menggunakan DIPA yang ada di Satker Setukpa Polri

Pembahasan

Secara tertulis mata pelajaran yang membahas toleransi tidak ditemukan dalam Rangka Pelajaran Pokok maupun Rangka Pelajaran Terurai maupun dalam bentuk Mata Pelajaran, namun ditemukan beberapa kompetensi dasar kelompok bidang sikap dan nilai yang mengajarkan nilai seperti kewarganegaraan dalam Mata Pelajaran Ideologi Pancasila dan Bela Negara. Demikian juga adanya pengakuan hak-hak dan pelaksanaan kewajiban baik secara pribadi maupun kelompok terdapat dalam mata pelajaran Hak Azasi Manusi (HAM) dan Kode Etik hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Nisvilyah (2013), Mumin (2018) dan Fadli (2019).

Pendapat Tauleka (2011), Barizi (2005) serta Penelitian Suciartini (2017), Pidarta (1997), Nurbaeti et.all (2018) Fuad (2018), tentang pentingnya penanaman nilai agama untuk mendukung terciptanya toleransi dan sikap menghargai agama orang lain dapat ditemukan pada materi Implementasi Pembinaan Rohani. Tersedianya materi serta komponen pendukung lainnya menggambarkan adanya aspek perencanaan dalam pendidikan keagamaan di Setukpa Polri.

Penunjukan personel yang mengawaki kegiatan keagamaan sesuai dengan bidang agama serta penentuan tema yang akan dibahas dalam setiap materi kegiatan pembinaan rohani dan memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk memilih perangkat peserta didik yang berkaitan dengan bidang-bidang agama menunjukkan adanya aspek pengorganisasian.

Kemampuan tenaga pendidik, pengasuh dan Pembina Rohani dalam mengendalikan prose pembelajaran dan kesediaan untuk meluangkan waktu dan memberikan peluang 5 menit sebelum azan untuk menuju ibadah dan turut langsung dalam praktek pelaksanaan ibadah menunjukkan pentingnya keteladanan sekaligus bentuk kerjasama antar komponen pendidik, tenaga kependidikan, Pengasuh langsung dan Pembina rohani hal ini juga menunjukan adanya pergerakan yang baik antar unsur-unsur yang terlibat.

Tersedianya peraturan dalam penilaian baik aspek akademis, mental dan kesamaptaan jasmani menjadi bukti adanya pengendalian pelaksanaan kegiatan. Monitoring dan keterlibatan secara langsung pada saat pelaksanaan kegiatan ibadah atau kegiatan sosial lainnya menunjukkan kehadiran unsur aspek pengendalian dalam kegiatan pendidikan keagamaan yang dilaksanakan.

Faktor Pendukung dan Penghambat

Komponen pendidikan sebagaimana disebutkan Ramayulis (2008) menjadi faktor yang menentukan keberhasilan manajemen pendidikan. Tersedianya sarana ibadah, kesadaran tenaga pendidik terhadap waktu ibadah, kesadaran pimpinan akan pentingnya ibadah, jaringan komunikasi yang baik dengan organisasi keagamaan serta tersedianya dukungan anggaran dalam pelaksanaan pendidikan mendorong penanaman nilai-nilai kerja sama, pemahaman agama yang utuh, saling menghargai yang akan mendorong munculkan sikap toleran. Hal ini selaras dengan penelitian Usman dan Widyanto (2019), Djollong dan Akbar (2019) menemukan ketersediaan tenaga pendidik yang berkompeten menjadi faktor pendukung terciptanya sikap toleran.

Dalam pelaksanaan kegiatan keagamaan untuk agama Katholik, Protestan dan Hindu dipandu oleh personel yang dianggap mampu serta melibatkan organisasi keagamaan diluar Setukpa, ini menunjukkan adanya kesadaran

personel dan pimpinan akan pentingnya pemahaman agama yang utuh dan komprehensif serta selaras dengan hasil penelitian Salim (2017), Barmawi dan Humaira (2018).

Hal yang berbeda dalam faktor penghambat ditemukan di Setukpa adalah terbatasnya jumlah tenaga pendidik khususnya agama Katholik, Protestan dan Hindu (Budha dan Konghucu bahkan tidak ada), hal ini dapat diatasi dengan komunikasi (yang menjadi penghambat menurut Barmawi dan Humaira (2018) yang baik dengan peserta didik beragama Budha dan Konghucu serta organisasi keagamaan dari luar Setukpa. Kegiatan ini juga menunjukkan adanya keterbukaan dan kesadaran bagi peserta didik lain untuk menerima dan memberikan kesempatan kepada agama lain untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan agamanya.

KESIMPULAN

Manajemen Pendidikan keagamaan bagi Perwira Polri di Setukpa Polri dilakukan dengan internalisasi materi-materi kerukunan dalam mata pelajaran dalam kelompok kepribadian dan diaplikasikan dalam bentuk kegiatan pengasuhan melalui penanaman karakter kebhayangkaraan. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan meliputi kegiatan dalam individu, kelompok agama maupun antar agama mencakup aspek perencanaan, pengorganisasian, penggerakan hingga pengawasan.

Kesadaran akan pentingnya nilai toleransi, tersedianya sarana, terciptanya komuniiasi yang baik menjadi faktor pendukung terbentuknya toleransi antar umat beragama sementara kekurangan personel aktif bidang agama selain Muslim yang bertugas di Setukpa menjadi penghambat terlaksanan manajemen pendidikan keagamaan meskipun tetap mendapat dukungan dari organisasi induk agama itu sendiri yang berada di luar Setukpa Polri.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, H.M. 1991. *Kapita Selekta Pendidikan (Islam dan Umum)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ayu Suciartini, Ni Nyoman. 2017. "Urgensi Pendidikan Toleransi Dalam Wajah Pembelajaran Sebagai Upaya Meningkatkan Kualitas Pendidikan." *Jurnal Penjaminan Mutu* 3 (1): 12. <https://doi.org/10.25078/jpm.v3i1.88>.
- Barizi, M.R. 2005. *Cetak Biru Peran Agama, Merajut Kerukunan, Kesetaraan Gender dan Demokrasi dalam Masyarakat Multikultural*. Jakarta: Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan, Departemen Agama.

- Barmawie, Babay, dan Fadhila Humaira. 2018. "Strategi Komunikasi Penyuluh Agama Islam." *Jurnal Dakwah dan Komunikasi* 9 (2): 1-14.
- Coulter, Robbin dan. 2007. *Manajemen (Edisi kedelapan)*. Jakarta: PT Indeks.
- Dinata, Muhammad Ridho. 2012. "Konsep toleransi Beragama dalam Tafsir al Qur'an Tematik Karya Departemen Agama." *ESENSIA* No. 1: 87.
- Djollong, Andi Fitriani, dan Anwar Akbar. 2019. "Peran guru pendidikan agama islam dalam penanaman nilai-nilai toleransi antar ummat beragama peserta didik untuk mewujudkan kerukunan (." *Jurnal Al Ibrah* VIII (01): 72-92.
- Echolas, John M dan Hassan Shadily. 1995. *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Endang, Busri. 2011. "Mengembangkan sikap Toleransi dan Kebersamaan dikalangan siswa." *Jurnal visi Ilmu Pendidikan* vol 6 No.: 89.
- Fadli, Subhan. 2019. "Membangun toleransi generasi milenial." *Prosiding Seminar Nasional, Harmonisasi dan Kebangsaan bagi Generasi Milenial, Lembaga Kajian Keagamaan, Universitas Pamulang*, 120-36.
- Fatah, Abdul. 2012. "Budaya Toleransi dalam Pelajaran Pendidikan Agama Islam." *Sekolah Pascasarjana UIN Jakarta*.
- Fuad, A. Jauhar. 2018. "Pembelajaran Toleransi: Upaya Guru Pendidikan Agama Islam dalam Menangkal Paham Radikal di Sekolah." *Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars* 9 (Series 2): 561-71. <http://proceedings.kopertais4.or.id/index.php/ancoms/article/view/159>.
- Kementerian Agama, Team Penyusun. 2019. *Moderasi Beragama*. Cetakan Pe. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Langgulong, Hasan. 2000. *Asas asas Pendidikan Islam*. Jakarta: al Husna Dzikra.
- Maulana, Mochamad Arie. 2017. "Pelaksanaan Toleransi Keberagamaan Dalam Proses Pendidikan Agama Di Geeta School Cirebon." *OASIS : Jurnal Ilmiah Kajian Islam* 1 (2): 17-38.
- Mumin, U Abdullah. 2018. "Pendidikan Toleransi Perspektif Pendidikan Agama Islam (telaah mutu pendekatan pembelajaran di Sekolah." *al-Afkar, Journal for Islamic Studies* 1 (2): 15-26. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3554805>.
- Munawwar, Said Agil Husain. 2005. *Fikih Hubungan Antar Agama*. Ciputat: PT Ciputat Press.

- Nisviilyah, Lely. 2013. "Toleransi antarumat Beragama dalam memperkokoh persatuan dan kesatuan Bangsa." *Kajian Moral dan Kewarganegaraan* 2 (1): 382-296.
- Nurbaeti, Nurbaieti, Amri Khalik, dan Khairun Nisa. 2018. "Pengaruh Pendidikan Agama terhadap Pembentukan Toleransi Beragama pada Mahasiswa Politeknik Negeri Ujung Pandang." *Prosiding seminar Hasil Penelitian (SNP2M)*, 289-94.
- Pidarta, Made. 1997. *Manajemen Pendidikan Islam*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ramayulis. 2008. *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Kalam Mullia.
- Saefullah. 2012. *Manajemen Pendidikan Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Salim, Achmad Nur. 2017. "Penanaman Nilai Toleransi Antar Umat Beragama di Kalangan Masyarakat Kecamatan Melati Kabupaten Sleman." *Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan*.
- Sari, Yuni Maya. 2014. "Pembinaan Toleransi dan Peduli Sosial dalam upaya memantapkan watak Kewarganegaraan (Civic Disposition) Siswa." *JPIS, Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial* 23taul (1): 15-26.
- Setukpa. 2019. *Rencana Operasional Pendidikan Sekolah Inspektur Polri*.
- Shihab, Alwi. 1999. *Islam Inklusif*. Bandung: Mizan.
- Siagian, Sondang P. 1989. *Filsafat Administrasi*. Jakarta: Gunung Agung.
- Suyatno, Suyatno. 2013. "Multikulturalisme dalam Sistem Pendidikan Islam: Problematika Pendidikan Agama Islam di Sekolah." *Addin* 7 (1): 81-104.
- Tauleka, H. 2011. *Sosiologi Islam*. Surabaya: IAIN SA Pres.
- Usman, Muhammad, dan Anton Widyanto. 2019. "Internalisasi Nilai-Nilai Toleransi dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 1 Lhokseumawe , Aceh , Indonesia The Internalization of Tolerance in Islamic Education Instruction at Public Senior High School 1 Lhokseumawe , Aceh , Indonesia." *Dayah: Jurnal Of Islamic Education* 2 (1): 36-52.